

Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rafi Alfiansyah^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Malang

*Corresponding author, e-mail: rafialfiansyah.28.02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan modal sosial yang terbentuk melalui kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejeki Barokah dalam memberdayakan masyarakat Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial Putnam. Metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial Putnam sebagai instrumen BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat yaitu aspek norma gotong royong dan keswadayaan menjadi pondasi dasar dalam pemberdayaan, yang mana berpengaruh pada ketercapainya program. Selanjutnya aspek jaringan sosial memuat hubungan yang dijalin BUMDes dengan persatuan BUMDes di Indonesia guna peningkatan kualitas program, dan peningkatan aspek kepercayaan masyarakat melalui program yang digagas dan dikelola yakni Bank sampah dan D'Gondoe café. BUMDes Rejeki Barokah Desa Sumbergondo, Kota Batu bisa mengatasi dan menekan permasalahan yang ada di wilayahnya, berupa masyarakat memperoleh feedback positif pada aspek sosial, seperti lowongan pekerjaan, magang dan pelatihan kewirausahaan, sedangkan aspek lingkungan yaitu lebih bersih, nyaman dan asri, dan aspek ekonomi berupa penambahan penghasilan.

Kata kunci: BUMDes; Modal sosial; Pemberdayaan masyarakat.

Abstract

This study aims to explain the social capital that is formed through the activities of Village Owned Enterprises (BUMDes) Rejeki Barokah in empowering the people of Sumbergondo Village, Bumiaji District, Batu City, East Java Province. This study uses a qualitative method with a case study type. This study uses Putnam's theory of social capital. The data analysis method used is the Miles and Huberman model. The results showed that Putnam's social capital as a BUMDes instrument in community empowerment, namely aspects of the norms of mutual cooperation and self-sufficiency, became the basic foundation in empowerment, which had an effect on the achievement of the program. Furthermore, the social network aspect includes the relationship between BUMDes and BUMDes associations in Indonesia in order to improve program quality, and increase aspects of public trust through programs initiated and managed, namely the Bank sampah and D'Gondoe Café. BUMDes Rejeki Barokah Sumbergondo Village, Batu City can overcome and suppress existing problems in their area, in the form of the community getting positive feedback on social aspects, such as job vacancies, apprenticeships and entrepreneurship training, while environmental aspects are cleaner, more comfortable and beautiful, and economic aspects in the form of additional income.

Keywords: BUMDes; Community development; Social capital.

How to Cite: Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41-51.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2023 by Jurnal Socius.

Pendahuluan

Pemerintah telah berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan dengan berbagai cara namun belum mencapai hasil yang optimal karena aspek yang sangat dominan berupa intervensi pemerintah yang sangat besar, yang membatasi energi inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam mengendalikan dan melaksanakan perekonomian di pedesaan (Suwendra & Sujana, 2020). Menurut informasi yang diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, masih ada 26% desa di Indonesia yang tergolong tertinggal, dengan dominasi wilayah timur. Kecendrungan itu terlihat jelas pada tingkat kemiskinan yang tinggi, kurangnya kemandirian ekonomi, area tempat tinggal yang tidak digunakan secara produktif, dan akses terbatas ke fasilitas penting yang semuanya itu digolongkan sebagai penanda ketertinggalan (Prawitno et al., 2019).

Lebih lanjut, pemerintah secara simultan telah memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa yang kemudian disebut dengan uang desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, salah satu prioritas penggunaan dana desa di lapangan adalah untuk mendukung modal bagi pemberdayaan masyarakat (Hidayah et al., 2019). Dengan demikian, pemerintah desa dapat mengupayakan terselenggaranya berbagai kegiatan yang memungkinkan kemajuan ekonomi masyarakat desa.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa "pemberian otonomi" yang luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Sesungguhnya istilah pemberdayaan berasal dari kata *power* (kekuasaan). Pemberdayaan adalah proses redistribusi kekuasaan dari yang "kuat" ke "tidak berdaya". Pemberdayaan adalah "proses membantu kelompok atau individu yang kurang beruntung dalam bersaing dan bekerja secara efisien karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam 'permainan' di mana semua 'pemain' memiliki kesempatan yang sama untuk menang" (Ife, 2008).

Mardikanto (2003) mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya kolektif oleh sekelompok orang untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui prakarsa sendiri, dengan atau tanpa bantuan orang lain. Tujuan pemberdayaan adalah untuk menyediakan alat-alat yang mereka butuhkan untuk menjadi mandiri (Nopita et al., 2020). Pemberdayaan merupakan proses yang harus diikuti dengan memaksimalkan potensi atau sumber daya yang dimiliki setiap masyarakat. Hal ini memerlukan tindakan nyata, seperti menawarkan berbagai wawasan dan membuka pintu ke berbagai kemungkinan yang dapat membantu masyarakat menjadi lebih berdaya di masa depan (Wijaya et al., 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diakui oleh pemerintah sebagai salah satu program yang paling efektif untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa. BUMDes merupakan organisasi korporasi yang semakin mampu dalam konteks pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengendalian aset dan sumber daya ekonomi menjadi penting. Misi BUMDes adalah meningkatkan pengelolaan aset, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Dewi, 2014). BUMDes harus mampu menyerap tenaga kerja produktif dan potensial begitu mereka berdiri di masyarakat. Selain itu BUMDes juga dapat memanfaatkan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka (Lestari et al., 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan BUMDes berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti yang telah dilakukan Rahayu & Febrina (2021) mengenai Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes. Sebagai bagian dari upaya memajukan desa dengan meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi desa sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan desa secara keseluruhan. Desa dapat melaksanakan proyek pembangunan sendiri, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Lebih lanjut, BUMDes memiliki kemampuan untuk mengubah kebutuhan masyarakat dan wajah pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur maupun non-sarana, melalui berbagai kegiatan yang meningkatkan pendapatan desa, kesejahteraan desa, dan anggaran BUMDes. Selain itu juga memberikan bimbingan dari semua pihak, terutama dari antusiasme basis partisipasi masyarakat yang sangat besar.

Kemudian Ristianita & Yusuf (2020), menjelaskan studi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, meliputi elemen penggerak dipisahkan menjadi dua kategori: internal dan eksternal. Tujuan dan keinginan orang untuk mencoba adalah kekuatan pendorong. Tujuan dan mentalitas ini dapat membantu memberdayakan orang lain. Faktor pendorong eksternal antara lain potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai daya tarik wisata serta dukungan masyarakat dan pemerintah desa terhadap inisiatif pemberdayaan saat ini. Pengaruh penghambat bisa bersifat internal dan eksternal. Minimnya sumber daya manusia yang memahami pengelolaan BUMDes menyebabkan banyak pengelola yang menempati tanggung jawab paralel. Manajer yang memiliki peran paralel harus mengelola dirinya

dengan baik. Sedangkan kendala eksternal adalah kekurangan dana APBD yang diberikan oleh pemerintah desa akibat dipecahnya menjadi bagian-bagian usaha BUMDes yang ada. Keterbatasan anggaran membuat keberhasilan dalam memberdayakan pembangunan menjadi tantangan. Selain itu, salah satu variabel yang dapat berkontribusi terhadap hal ini adalah kurangnya sosialisasi dan *networking* dengan mitra bisnis luar.

Berutu et al., (2020) melakukan studi pada aspek pendukung optimalisasi fungsi BUMDes pada setiap program adalah sebagai berikut: 1) kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan pokok; 2) pengurangan pengangguran; dan 3) memaksimalkan pemanfaatan lahan desa untuk membantu pembangunan ekonomi lokal. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan berikut mungkin menjadi kendala: 1) padatnya jadwal masing-masing pengelola BUMDes; 2) fungsi ganda yang dijalankan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; dan 3) kurangnya sumber daya. Sedangkan Firdaus (2020) membahas upaya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian pedesaan secara umum diyakini berhasil, ditunjukkan dengan lancarnya inisiatif-inisiatif utama BUMDes. Organisasi BUMDes juga memiliki tugas lain, seperti menumbuhkan kewirausahaan di berbagai industri, mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dalam proses pendirian usaha, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada komunitas lain.

Prasetyo (2016) menjelaskan terkait Peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, diantaranya: 1) Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes. Keterlibatan masyarakat akan membantu program BUMDes memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan lebih baik. Dengan kata lain, semua orang di dusun akan mendapat untung dari BUMDes; 2) Meskipun manajer BUMDes tidak memiliki gelar manajemen bisnis formal, hal ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada manajer; 3) BUMDes dapat menampung semua perusahaan kecil atau industri kecil desa, mendorong semacam kolaborasi komersial. Dalam situasi ini, BUMDes dapat membantu dengan pemasaran dan pelatihan bagi pelaku usaha yang mengumpulkan keuangan mereka. Beberapa ide harus dievaluasi di lapangan, tetapi setiap program yang dikembangkan oleh BUMDes harus berpegang pada semangat gotong royong dan perusahaan berbasis potensi lokal yang menghasilkan tidak hanya perbaikan fisik tetapi juga sosial.

Mahmuda (2021) menjelaskan Pengelolaan Administrasi Keuangan BUMDes sangat penting, dan diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa yang terwujud dalam penyelenggaraan BUMDes yang kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab, dan berjangka panjang. Agar perekonomian desa dapat berjalan dengan bebas, berhasil, dan profesional, serta memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Akibatnya, modal sosial menjadi sangat vital dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang mendorong akses terhadap pengetahuan, keterlibatan, dan kemampuan kelompok lokal didefinisikan sebagai kegiatan pemberdayaan karena bersifat langsung dan inklusif (Usman, 2005).

Individu terlibat dalam berbagai ikatan komunitas seperti kedekatan tempat tinggal, kesetaraan profesi, agama, suku, hobi, dan minat yang masing-masing berkembang dengan karakteristiknya sendiri, maka pemberdayaan harus bersifat "community based empowerment" (CBE). Dengan kata lain, kebijakan yang dikembangkan harus mempertimbangkan modal sosial yang dimiliki suatu masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah dapat menggali potensi yang ada pada setiap masyarakat dan mau bekerjasama dengan seluruh aset masyarakat (Wirutomo, 2012). Modalitas lain dianggap sebagai modal sosial. Secara teoritis, modal sosial mengarah pada interaksi sosial. Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial, individu atau organisasi dapat menggunakan ikatan sosial seperti nilai, jaringan sosial, dan kepercayaan (Fathy, 2019).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Upadani (2017) mengenai Model Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Pemberdayaan masyarakat akan gagal jika kebutuhan untuk melibatkan komponen budaya dan pemanfaatan fungsi modal sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak disadari. Mengembangkan dan mempertahankan beragam operasi komersial di banyak bidang kehidupan akan ditentukan oleh penciptaan dan keberlanjutan modal sosial, yang mencakup kepercayaan, perdagangan timbal balik, norma sosial, dan cita-cita etis. Selanjutnya, Utami (2020) melakukan penelitian tentang Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat. Modal sosial desa yang kuat dapat mengatasi masalah. Prestasi desa dalam memberdayakan masyarakatnya melalui dinamika modal sosial. Kepercayaan, jaringan sosial, dan konvensi adalah bentuk modal sosial. Melihat hasil membangun kepercayaan dengan mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan desa wisata, dua jaringan sosial yang kuat telah membantu merevitalisasi dan mempertahankan kegiatan desa wisata. Ketiga, norma kepercayaan yang mungkin mengarahkan kolaborasi individu. Pemberdayaan bekerja paling baik ketika sebuah komunitas kuat, dengan nilai-nilai, jaringan sosial, dan standar yang kuat.

Sehabuddin et al., (2016) tentang Modal Sosial dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Partisipasi dalam jaringan, kepercayaan, gotong royong, dan kemandirian merupakan beberapa aspek modal sosial dan kewirausahaan yang dikembangkan. Faktor-faktor tersebut antara lain terkait dengan peningkatan

kemampuan dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari berbagai penelitian terdahulu, menunjukkan BUMDes memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan, seperti pemanfaatan potensi desa, peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Selain itu modal sosial yang ada juga ikut mempengaruhi proses dalam pemberdayaan yang dilakukan, meliputi norma dan nilai (gotong royong dan keswadayaan), jaringan sosial (organisasi formal dan informal) dan kepercayaan, sehingga kedua konsep tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan. Namun pada penelitian sebelumnya tidak membahas kedua konsep tersebut secara berkaitan dan cenderung hanya satu konsep yang dijadikan acuan dalam pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, artikel ini berusaha mengkaji keterkaitan kedua konsep sekaligus dalam proses pemberdayaan masyarakat di pedesaan, beserta bentuk dan dampak dari pemberdayaan yang dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa menggunakan jenis penelitian kualitatif, “karena peneliti ingin membuat gambaran yang kompleks dengan proses wawancara dari pandangan informan, serta melakukan studi pada situasi yang alami” (Creswell, 1998). Selain itu, data primer didapatkan melalui proses pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam pemberdayaan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur baik jurnal maupun buku yang relevan dengan konsep peneliti, meliputi modal sosial, BUMDes dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai perspektif diperlukan dalam penelitian kualitatif selain dari informan subjek karena kedalaman data berfungsi sebagai prioritas dalam memperoleh data daripada jumlah informan. Model Miles dan Huberman digunakan dalam pendekatan analisis data yaitu pengumpulan data dengan melakukan survei lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta pada aspek pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan penentuan informan dengan ciri-ciri yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya reduksi data, dilakukan dengan cara meringkas dan memilih bagian data yang pokok atau penting. Pada tahap selanjutnya melakukan penyajian data bisa berupa bagan, kategori/sub judul. Kemudian pada tahap akhir berupa penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Bank Sampah

Sampah menjadi isu utama di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kapasitas timbunan sampah tidak sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Volume sampah yang signifikan di Desa Sumbergondo disebabkan oleh banyaknya industri dan UKM yang ada, serta produsen sayur dan buah. Sampah sayur dan buah merupakan penyumbang terbesar volume sampah. Orang-orang membuang sampah ke sungai karena sarana dan prasarana tidak mampu mengatasi. Tempat pembuangan sampah, serta dua kontainer yang digunakan, tidak mampu menampung jumlah sampah yang signifikan. Selain itu, sampah yang menumpuk dan berjejer di pinggir jalan di Desa Sumbergondo sepanjang 50-100 meter, mengancam lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan.



Gambar 1. Bank Sampah BUMDes Rejeki Barokah

Bank sampah muncul sebagai prakarsa masyarakat setempat dalam upaya ikut serta mengatasi permasalahan yang ada. Strategi pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) berbasis masyarakat mampu mengubah imajinasi sebagian besar masyarakat terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 menyoroti perlunya beralih dari pengelolaan sampah tradisional ke pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Membatasi timbulan sampah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah (sering dikenal sebagai 3R) adalah semua cara untuk mengurangi sampah (Selomo et al., 2016).

Gambar 1 merupakan program Bank Sampah yang dibuat berdasarkan visi dan misi BUMDes dalam pengelolaan sampah mandiri Desa Sumbergondo, dengan jenisnya ada insinerator, komposter dan pengangkut yang dikelola BUMDes. Melalui skema BUMDes kerentanan lingkungan bisa ditekan atau teratasi dengan membentuk program Bank Sampah. Sebagai organisasi sosial di daerah, Bank Sampah berperan sebagai katalisator partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Selanjutnya dengan mengelompokkan sampah organik dan anorganik secara partisipatif, masyarakat penghasil sampah menjadi peserta dalam proses pengelolaan sampah (Sekarningrum et al., 2017).

Jumaati selaku Ketua Bank Sampah mengatakan bahwa pada tahun 2021 lebih fokus mengenai memilah sampah dari rumah dengan tujuan untuk mengurangi beban pengangkutan sampah, dengan anggaran yang sudah tersedia melalui skema BUMDes. Dana yang dihabiskan kurang lebih Rp. 50 juta termasuk bangunan, dan fasilitas lainnya berupa tong sampah dan alat pengangkut (tosa). Pelaksanaan program Bank Sampah Desa Sumbergondo membutuhkan waktu kurang lebih 10 Bulan, mulainya sekitar bulan agustus 2020, sekarang sudah ada 10 bank sampah di RT dari target 17 bank sampah. Jumlah pekerja 8 orang dengan 6 orang bagian pengangkutan dan 2 orang bagian pemilahan. Pada proses pengangkutan sampah dari rumah dilakukan seminggu dua kali. Bank Sampah diposisikan untuk setiap rumah diusahakan dapat memilah sampah yang bisa dijual, seperti kertas, botol, dll. Kemudian residunya dibuang ke tong sampah yang sudah disediakan BUMDes.

Tujuan Pencapaian Program yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat bahwa sampah ternyata memiliki nilai komoditas, memperoleh penghasilan tambahan melalui sampah, meningkatkan kepedulian lingkungan, dan mengurangi volume sampah dan residu. Pengelolaan Bank Sampah berbasis masyarakat telah menginspirasi individu untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya, maka dikenal juga sebagai inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis masalah. Ini memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendistribusikan tanggung jawab lingkungan (Sekarningrum et al., 2017). Perempuan PKK mengelola bank sampah di pedesaan dengan penggerak utama sebagai pengelola. Rata-rata cakupan pelayanan bank sampah dalam skala dusun, merupakan kegiatan sukarela yang belum menjadi kegiatan utama. Frekuensi pelayanan rata-rata seminggu sekali, dengan hari dan jam ditentukan oleh penduduk. Sampah kertas, kaleng/botol/logam, dan beberapa sampah plastik termasuk jenis sampah yang diterima; setiap bank sampah di pedesaan memiliki pemimpin (Suwerda et al., 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Salam, selaku Ketua Karang Taruna Desa Sumbergondo. Bahwasannya Karang Taruna juga ikut berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan Bank Sampah di Desa Sumbergondo. Karang Taruna pada aspek pemberdayaan masyarakat di bank sampah berpartisipasi dalam membantu teknik operasional berupa pengangkutan dan pemilahan. Bentuk partisipasi di bank sampah merupakan keswadayaan para anggota karang taruna dalam mendukung dan mensukseskan program bank sampah yang dibentuk oleh BUMDes, guna tercapainya lingkungan bersih masyarakat yang humanis dan peduli pada lingkungan. Anwas (2014) Individu dan kelompok harus didorong dan diciptakan agar para pelaku pemberdayaan mampu menggeser perilakunya menuju kemandirian (empowerment). Perubahan perilaku ini bermanfaat bagi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dalam hal pengetahuan, sikap, dan kemampuan (Hendra, 2017).

Adapun langkah pemberdayaan yang dilakukan “BUMDes dalam program Bank Sampah kepada masyarakat Desa Sumbergondo, antara lain: (1) memberikan sosialisasi bagaimana melakukan pemilihan sampah dengan baik, berupa pemisahan sampah organik maupun sampah anorganik melalui pemanfaatan Bank Sampah yang nantinya akan dibentuk; (2) memberikan pelatihan kepada kelompok sasaran mengenai bagaimana mengelolah Bank Sampah. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi ibu-ibu bagaimana memilih dan memilah sampah pada kategori organik maupun non organik, kemudian memberikan pelatihan bagaimana memberdayakan sampah organik dan sampah non organik menjadi sampah yang memiliki nilai komoditas yang dapat meningkatkan pendapatan mereka tentunya melalui peran Bank Sampah; (3) melakukan bimbingan teknik langsung bagaimana menggunakan Bank Sampah sampai pada tahapan menabung sampah sehingga memberikan penghasilan pendapatan bagi ibu-ibu; (4) melakukan pengawasan berkelanjutan dalam tahapan ini diharapkan adanya sinergitas antara pemerintah daerah, kecamatan maupun desa dalam hal memberikan sosialisasi tentang pembentukan dan pemanfaatan Bank Sampah secara terus menerus dan tentunya didukung oleh sarana dan prasarana penunjang untuk keberlanjutan program tersebut”

Tabel 1. Data Pemasukan di Bank Sampah BUMDes Rejeki Barokah bulan April 2021

No	Nama	Bulan	Tahun	Debet (Rp)
1	Arin Fitria	April	2021	400.000
2	Sungatemi	Mei	2021	300.000
3	Sunarti	Juni	2021	330.000
4	Ririn	Juli	2021	194.000
5	Muti	Agustus	2021	171.050
6	Nila	September	2021	97.300
7	Kemi	Oktober	2021	32.400
8	Sapari	November	2021	280.000
9	Sulin	Desember	2021	42.000
10	Andik	Januari	2021	393.100
11	Nurmi	Februari	2021	75.200
12	Galih	Maret	2021	400.000
13	Jidah	April	2021	231.700
14	Arin Fitria	Mei	2021	255.000
15	Najam	Juni	2021	50.000
16	Nhatemi	Juli	2021	115.000

Sumber: Hasil olah Data Peneliti dari buku catatan Bank Sampah 2021

Tabel 1 merupakan debit setoran pada bulan April 2021 sejumlah Rp. 3,3 juta dengan jumlah keuntungan kotornya Rp. 4,9 juta, sehingga memperoleh keuntungan bersih Rp. 1,6 juta. Debit pemasukan bisa berubah-ubah karena dipengaruhi oleh jumlah barang yang disetorkan.

Pemberdayaan D'Gondoe Cafe



Gambar 2. D'Gondoe cafe

Sumber: Instagram D'Gondoe café

Gambar 2 merupakan salah satu program yang diberdayakan oleh BUMDes Rejeki Barokah, dalam bentuk kewirausahaan cafe yang berlokasi di Gang Tarman no 20, Dusun Gundu, Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pembangunan ekonomi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, menurut [Ife & Tesoriero \(2008\)](#) pembangunan ekonomi masyarakat konservatif dan radikal. Menarik bisnis, mengembangkan perusahaan lokal, dan mempromosikan pariwisata adalah contoh pembangunan ekonomi masyarakat yang konservatif. Sementara itu, koperasi, bank komunitas, dan serikat kredit dapat membantu meradikalisasi pembangunan ekonomi radikal. Sementara itu, pembangunan sosial adalah jenis kegiatan pengembangan masyarakat yang melibatkan penciptaan layanan, pusat komunitas, perencanaan sosial, dan gairah sosial.

Merujuk pada penelitian [Ife & Tesoriero \(2008\)](#) D'Gondoe cafe masuk dalam tipe pembangunan ekonomi konservatif, karena salah satu program yang dibentuk BUMDes dalam model cafe bertema potensi lokal, berupa pohon apel dan bunga mawar (disekitaran cafe). Hasil wawancara dengan Anditya Fitrawan selaku Direktur BUMDes Rejeki Barokah, bahwasanya biaya pembangunan menghabiskan dana kurang lebih Rp. 150 juta, karena sebelumnya sudah ada bangunan setengah jadi dengan menggunakan modal dari BUMDes. Lama proses pembangunan kurang lebih 3 bulan. Tujuan di bentuknya program ini untuk pemberdayaan masyarakat dalam konteks kewirausahaan, sekaligus pembangunan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan berupa: (1) Membuka lowongan kerja; (2) Melatih kewirausahaan yang terbagi dalam bidang sosial media, kasir, manager dan dari segi teknis terdapat pelayan, snack, dapur dan barista; (3) Mitra kerja sama dari D'Gondoe Cafe antara lain pemilik lahan, UMKM, Suplier makanan/pedagang sayur, toko kelontong.

Merujuk pada penelitian Narayan (2002) terdapat empat faktor krusial yang harus ada agar masyarakat dianggap berdaya; (1) Terinformasi dengan baik sehingga anda selalu menyadari peluang dan tidak tinggal diam ketika kebijakan dilanggar; (2) Komunitas dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan; (3) Akuntabilitas dan kemampuan mempertanggungjawabkan semua uang yang dikelola oleh masyarakat; (4) Kemampuan masyarakat untuk mengorganisir kekuasaannya sendiri dalam rangka memobilisasi sumber daya untuk menangani isu-isu kepentingan publik. Setelah dibangunnya D'Gondoe Cafe secara tidak langsung berdampak pada masyarakat berupa terbukanya lowongan pekerjaan, hingga saat ini memperkerjakan sejumlah 12 orang, selain itu juga berupa bisa memberikan dampak ekonomi, memberi tambahan keuntungan bagi UMKM dan supplier (makanan, minuman), selain itu juga parkir dikelola warga sekitar, supplier kebutuhan dimaksimalkan berasal dari Desa Sumbergondo.

Pembahasan

Konsep Modal Sosial

Studi modern menyeluruh pertama tentang modal sosial diberikan oleh Bourdieu (1986), yang mendefinisikannya sebagai kuantitas nyata atau prospektif dari sumber daya yang terhubung dengan keberadaan jaringan yang langgeng dari kenalan atau pengakuan timbal balik yang kurang lebih formal. Lebih lanjut, sosiolog, politik, dan ekonomi semuanya menggunakan istilah "modal sosial" dengan cara yang berbeda. Putnam (1993) melihat hubungan antara fokus jaringan sosial horizontal dan kesuksesan ekonomi. Coleman (1988) mendefinisikan modal sosial dalam pengertian yang lebih luas, berfokus pada dampak institusi vertikal dan hierarkis terhadap kinerja buruk dan baik perusahaan. Untuk menggambarkan kekuatan modal sosial, dapat digunakan tiga tipologi: modal sosial yang mengikat, modal sosial yang menjembatani, dan modal sosial yang menghubungkan. Menurut Abdullah (2013), modal sosial memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai pelumas, mendorong interaksi dan kolaborasi untuk memenuhi tujuan individu secara cepat dan efektif.

Secara umum, tiga jenis modal sosial yang berbeda telah muncul, membentuk pola untuk mengategorikan bentuknya yang sangat beragam. Ini adalah bentuk struktural, kognitif dan relasional modal sosial yang sesuai, misalnya, untuk jaringan atau organisasi, saling pengertian atau budaya, dan kepercayaan atau timbal balik (Fine, 2008). Modal sosial memberikan pemahaman dan pengertian yang begitu dinamis. Tingkat analisis masyarakat dan negara digunakan oleh Coleman (1988), Putnam (1995), dan Fukuyama (1995), misalnya. Sedangkan kelompok analisis unit ditekankan oleh Ghoshal (1988). Akdere (2005) membagi modal sosial menjadi tiga kategori. Tingkat pertama adalah analisis makro, yang berkaitan dengan pemerintahan, fungsi hukum, dan kebebasan sipil dan politik. Pembentukan kelompok dan organisasi diprioritaskan pada tingkat meso. Pada tingkat mikro, mengacu pada tingkat analisis individu (Tjahjono, 2017).

Modal menurut Narayan & Pritchett (1997), adalah sesuatu yang terakumulasi dan berkontribusi pada peningkatan upah atau pengembalian yang lebih baik. Tanpa deskripsi tambahan, "sesuatu" hanya dicirikan sebagai tautan dan interkoneksi horizontal. Para penulis kemudian mengidentifikasi lima mekanisme di mana modal sosial berubah menjadi lebih baik dengan memfasilitasi kolaborasi yang lebih besar, seperti yang terlihat dari tingkat investasi yang lebih tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, layanan pemerintah yang lebih efisien, dan institusi sosial yang lebih baik, misalnya, pengoperasian sistem peradilan perdata dan pidana, serta proses internal yang lebih efektif dalam organisasi (Helliwell & Putnam, 1995).

Modal sosial suatu komunitas dianggap memiliki pengaruh besar bagi penghuninya. Bank Dunia mendefinisikan modal sosial sebagai aspek kelembagaan, hubungan yang terjalin, dan norma-norma yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam masyarakat, serta perekat yang mengikat anggota kelompok bersama. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup, dimensi modal sosial menekankan pada kebersamaan masyarakat, oleh karena itu penting untuk membangun nilai-nilai yang harus diterima oleh anggotanya, seperti sikap partisipatif, saling peduli, memberi dan menerima, dan saling percaya (Cahyono, 2014). Masyarakat yang tertib dan berkembang ditentukan oleh dan dibangun di atas modal sosial. Modal sosial merupakan potensi dalam suatu komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan, memperkuat, bahkan meningkatkan potensi aset lainnya. Intinya, modal sosial mengacu pada kemampuan anggota dalam suatu masyarakat untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk memecahkan masalah (Saheb et al., 2013).

Tabel 1. Analisa Konsep Modal Sosial dengan Temuan Lapangan

No	Tahapan	Konsep	Temuan Lapangan
1.	Norma	<p>Putnam (1993) “menggambarkan norma sebagai seperangkat keyakinan, nilai, harapan, dan aspirasi bersama yang dimiliki oleh sekelompok individu. Agama, pedoman moral, standar sekuler, dan kode etik profesi semuanya merupakan sumber norma. Norma dibuat dan berkembang berdasarkan sejarah kolaborasi di masa lalu, dan kemudian digunakan untuk menumbuhkan lingkungan kerja sama” (Widiawati, 2015).</p> <p>Norma dan nilai menurut Collette (1987), merupakan pengertian yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong telah mengakar, serta menyebar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan telah menjadi pranata sosial terpenting dalam pembangunan, di Indonesia modal sosial sering diekspresikan melalui budaya gotong royong dan rebug warga. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam membantu orang lain dan bekerja sama satu sama lain (Faedlulloh, 2017).</p> <p>Gotong-royong adalah suatu ideologi dinamis yang menggambarkan suatu usaha gotong royong, amal, karya, dan perjuangan untuk membantu sesama. Gotong-royong adalah hasil dari dorongan kesadaran dan kegairahan untuk melakukan dan menanggung akibat dari suatu pekerjaan, terutama yang dilakukan secara bersama-sama, serentak, dan berkelompok, tanpa memikirkan atau mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi selalu untuk kepentingan dari kesenangan bersama (Effendi, 2013).</p> <p>Keswadayaan melalui gotong royong pada hakikatnya merupakan nilai yang diwujudkan dalam perilaku dan tindakan masyarakat, yang dibuktikan dengan inisiatif membersihkan lingkungan, kemampuan membangun jembatan, atau memperbaiki jalan, dan melalui gotong royong bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan individu atau mengumpulkan dana sosial (Warto, 2016).</p>	<p>Nilai kegotongroyongan yang ada di wilayah Desa Sumbergondo, Kota Batu menjadi perekat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang dibentuk. Pemerintah desa dan masyarakat (baik meliputi RT/RW, Karang Taruna dan Ibu PKK) berperan penting dalam melakukan suatu perubahan sosial di lingkungannya. Pada aspek nilai kegotongroyongan ini Pemerintah Desa Torongrejo berperan dalam pemberian sarana dan prasarana, berupa fasilitas (meliputi, lahan dan modal), sedangkan masyarakat berperan dalam penyampaian ide dan aspirasinya kedalam bentuk program dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, serta melakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada warga sekitar guna tercapainya masyarakat, adil, makmur dan sejahtera (<i>Hasil wawancara dengan Anditya Fitrawan, selaku Direktur BUMDes Rejeki Barokah</i>).</p> <p>Keswadayaan mengacu pada kemampuan masyarakat desa untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kemandirian pengelolaan pembangunan. Anggota dan pengurus mengejar kemandirian dalam kerangka modal sosial tidak hanya untuk mendapatkan kekayaan moneter, tetapi juga untuk meningkatkan ikatan keluarga, meningkatkan intensitas kekerabatan, dan mencapai tujuan dan aspirasi bersama.</p> <p>Keswadayaan terlihat pada BUMDes di Desa Sumbergondo Kota Batu, terlihat dari semangat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program-program yang telah ditetapkan. Bentuk dukungan dan partisipasinya adalah pada tahap perencanaan warga aktif mengikuti sosialisasi, musyawarah, penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan berupa partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes, yang secara otomatis berpartisipasi dalam aspek energi dan aset.</p>
2.	Jaringan Sosial	<p>Putnam (1993) membagi jaringan menjadi “komponen formal dan informal. Jaringan formal dibentuk oleh keanggotaan resmi (misalnya, dalam asosiasi), sedangkan jaringan informal dibentuk melalui simpati timbal balik (misalnya persahabatan). Jaringan juga bisa diatur secara horizontal dan vertikal, menurut Putnam. Jaringan vertikal terdiri dari individu yang berbeda</p>	<p>Keterlibatan kelompok BUMDes Rejeki Barokah dengan komunitas BUMDes yang ada di Indonesia merupakan salah satu cara peningkatan kualitas program yang diberdayakan. BUMDes Rejeki Barokah merupakan salah satu BUMDes di Kota Batu yang telah sukses dalam menangani permasalahan lingkungan di desanya</p>

No	Tahapan	Konsep	Temuan Lapangan
		<p>dalam hubungan hierarkis dan ketergantungan yang tidak setara, sedangkan jaringan horizontal terdiri dari orang-orang dengan posisi dan otoritas yang sama” (Dwiningrum, 2014).</p> <p>Jejaring adalah dasar untuk kohesivitas sosial karena mereka menginspirasi orang untuk berkolaborasi satu sama lain untuk keuntungan bersama daripada hanya dengan orang yang mereka kenal (Field, 2011).</p> <p>Observasi Study Tour (OST) ini bertujuan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dan “<i>best practice</i>” dengan komunitas lain yang telah berhasil melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (Sehabuddin et al., 2016).</p>	<p>secara mandiri melalui program Bank Sampah dan pengelolaan sampahnya, sehingga hal ini menimbulkan adanya kegiatan penerimaan kunjungan atau biasa dikenal dengan <i>OST (Observation Study Tour)</i> dari berbagai daerah di Indonesia diantaranya Papua, Sulawesi, Kalimantan dengan kegiatan studi banding (Hasil wawancara dengan Anditya Fitrawan, selaku Direktur BUMDes Rejeki Barokah).</p>
3.	Kepercayaan	<p>Putnam (1993), kepercayaan adalah “pelumas kehidupan. Semakin tinggi rasa saling percaya dalam suatu masyarakat, semakin besar kemungkinan orang akan bekerja sama, di dunia saat ini, dua sumber kepercayaan yang terhubung erat dapat ditemukan: norma timbal balik dan jaringan yang mengikat secara umum” (Widiawati, 2015).</p> <p>Kerjasama dan rasa saling percaya di antara orang-orang, serta dengan lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar masyarakat, merupakan komponen kunci dari modal sosial. Komunitas dapat memperoleh manfaat bersama melalui kolaborasi reguler dan tingkat kepercayaan yang tinggi (Fadli, 2015).</p>	<p>Rasa percaya masyarakat terhadap BUMDes Rejeki Barokah timbul karena pengurus BUMDes telah membuktikan bahwa program dan kegiatan bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, melainkan kembali lagi untuk masyarakat. Pembuktian yang dilakukan berupa membuat program Bank Sampah dengan tujuan mengatasi permasalahan lingkungan, memanfaatkan sampah supaya memiliki nilai komoditas, meningkatkan kepedulian lingkungan dan menambah penghasilan. Selain itu program D’Gondoe Cafe secara tidak langsung juga memberikan feedback positif kepada masyarakat berupa terbukanya lowongan kerja, memberi tambahan keuntungan bagi UMKM dan supplier (makanan, minuman, tanaman atau dekorasi), dan pelatihan kewirausahaan (Hasil wawancara dengan Anditya Fitrawan, selaku Direktur BUMDes Rejeki Barokah).</p>

Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti (2021)

Simpulan

BUMDes beroperasi sebagai inisiator dan agen perubahan sosial di tingkat pedesaan, memanfaatkan modal sosial berwujud jaringan sosial, norma dan saling percaya dalam proses pemberdayaan. Pada aspek norma, misalnya di Desa Sumbergondo, gotong royong dan keswadayaan yang begitu mendarah daging di sebagian besar masyarakat, merupakan elemen mendasar dari proses pemberdayaan, dengan bukti bahwa berbagai elemen masyarakat (RT/RW, ibu PKK, Karang Taruna) berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat sehingga memudahkan proses sosialisasi, pengelolaan dan rasa memiliki. Jaringan sosial, berupa keterlibatan kelompok BUMDes Sumbergondo, Kota Batu dengan komunitas BUMDes yang ada di Indonesia, dengan tujuan studi banding dan peningkatan kapabilitas dan kualitas program.

Kemudian pada aspek kepercayaan muncul karena program yang digagas dan dikelola (Bank sampah dan D’Gondoe café) BUMDes Sumbergondo, Kota Batu bisa mengatasi dan menekan permasalahan yang ada di wilayahnya, berupa masyarakat memperoleh feedback positif pada aspek sosial, seperti lowongan pekerjaan, magang dan pelatihan kewirausahaan, sedangkan aspek lingkungan yaitu lebih bersih, nyaman dan asri, dan aspek ekonomi berupa penambahan penghasilan. Meskipun penelitian tentang modal sosial, BUMDes dan pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian ini akan

memberikan suatu pembaruan berupa penerapan konsep modal sosial dan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas ruang lingkungannya untuk mengetahui aspek lain yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

Rujukan

- Abdullah, S. (2013). Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas. *SOCIUS : Jurnal Sosiologi*, 12(2), 15–21.
- Berutu, B. R., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1–10.
- Bourdieu P. (1986). *The Forms of Capital*. In JG Richardson (ed), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Cahyono, B. (2014). Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekobis*, Vol. 15(1), 1–16.
- Coleman, JS. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94 (5), 95– 121.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Chosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2014). *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23403>
- Fadli. (2015). Modal Sosial dan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Agrium*, 12(1), 35–39. <https://doi.org/10.29103/agrium.v12i1.383>
- Faedlulloh, D. (2017). Modal Sosial dan Praktik Gotong Royong Para Pengrajin Gula Kelapa di Desa Ketanda Kabupaten Banyumas. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 89–101. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1467>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Field, John. (2011). *Modal sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fine, B. (2008). Social Capital Versus Social History. *Social History*, 33(4), 442–467. <https://doi.org/10.1080/03071020802410445>
- Firdaus, R. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1387–1394.
- Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (1995). Economic Growth and Social Capital in Italy Economic growth and social capital in Italy. *Eastern Economic Journal*, 21(3), 295–307.
- Hendra, T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-qur'an. *Jurnal Hikmah*, 11(2), 191–213.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 144–153. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i2.676>
- Ife, Jim., & Frank Tesoriero. (2008). *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kimbal, R. W. (2015). *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurnianto Tjahjono, H. (2017). Modal Sosial Sebagai Properti Individu: Konsep, Dimensi dan Indikator. *JBTI : Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, 8(2), 184–189. <https://doi.org/10.18196/bti.82092>
- Lestari, A. D., Kurnia, D., & Setiawan, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. *Jurnal Caraka Prabhu*, 3(2), 127–151. <https://doi.org/10.36859/jcp.v3i2.354>
- Mahmuda, D. (2021). Penyuluhan Mengenai Peran Penting BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(1), 101–107.
- Narayan, Deepa. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook, (Washington, D.C.: Poverty Reduction and Economic Management (PREM))*. World Bank.
- Nopita, M., Sujadmi, & Febriani, L. (2020). Pemberdayaan Perempuan Pada Kelompok Wanita Tani(Kwt) Nurjanah di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–57.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika Volume*, 11(1), 86–100.

-
- Prawitno, A., Rahmatullah, & Safriadi. (2019). Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 50–60.
- Putnam R. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61.
- Ristiana, & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>
- Saheb, Slamet, Y., & Zuber, A. (2013). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v4i2.860>
- Sehabuddin, U., Warcito, & Sadih. (2016). Modal Sosial dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. *Jurnal Manajemen*, 7(1), 29–38.
- Sekarningrum, B., Yunita, D., & Sulastri, S. (2017). Pengembangan Bank Sampah Pada Masyarakat di Bantaran Sungai Cikapundung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 292–298.
- Selomo, M., Birawida, A. B., Mallongi, A., & Muammar. (2016). Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar. *Jurnal MKMI*, 12(4), 232–240.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwendra, I. W., & Sujana, I. N. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 2(1), 393–402.
- Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A. (2019). Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan di Wilayah Perdesaan Kabupaten Bantul. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(1), 74–86. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol11.iss1.art6>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Upadani, I. G. A. W. (2017). Model Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bali. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 1(1), 11–22.
- Usman, Sunyoto. (2005). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34–44. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1604>
- Warto, W. (2016). Keswadayaan Masyarakat Perdesaan melalui Gotong Royong. *Jurnal PKS*, 15(3), 281–294.
- Wijaya, S. H., Sartono, & Yusuf, M. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional*, 6(2), 34–39.
- Wirutomo, P. (2012). *Sosiologi Untuk Jakarta: Menuju Pembangunan Sosial Budaya*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.